

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merencanakan beberapa kebijakan strategis nasional, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pada Surat Edaran Kemendagri No. 500.3/2438/SJ, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal, program ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan kebijakan strategis nasional yang membantu desa dan kelurahan untuk mendirikan koperasi.

Selain itu, kebijakan ini merupakan komponen penting dari visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Namun, secara umum masih ada banyak hambatan untuk menerapkan kebijakan koperasi tersebut di beberapa daerah.

Menurut Febianriza Arzewiniga & Zulkarnain (2025:221) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa, namun, sejumlah masalah struktural dan historis mengancam keberhasilannya. Beberapa masalah yang ditemui termasuk pemahaman yang buruk oleh masyarakat dan pengelola koperasi tentang mekanisme dan keuntungan Koperasi Merah Putih, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola koperasi secara profesional, dan ketergantungan koperasi pada dana pemerintah, yang berpotensi menyebabkan kurang mandiri. Selain itu, kendala geografis dan sosial ekonomi di daerah tertentu membuat program menjadi lebih sulit untuk dioptimalkan.

Pada pembahasan ini mengambil Koperasi Merah Putih di wilayah Jawa Timur, terutama Kota Malang. Kota ini adalah kota besar dengan banyak kelurahan dan memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah Kota Malang berusaha mempercepat pembentukan 57 unit Koperasi Merah Putih yang sudah resmi terbentuk di seluruh kelurahan sebelum tahun 2025 (Metro Tv News, 2025) . Wilayah ini dipilih karena pengelolaan koperasi dan dinamika sosial-ekonomi yang masih membutuhkan dukungan dan penguatan. Selain itu, kelurahan, sebagai unit terkecil pemerintahan, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Di Kelurahan Pandanwangi, ada masalah dengan sosialisasi kebijakan koperasi yang tidak merata, yang mengurangi partisipasi masyarakat. Banyak

warga belum memahami sepenuhnya peran dan keuntungan koperasi Merah Putih, sehingga diperlukan pendampingan khusus. Selain itu, pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan masih menghadapi masalah seperti manajemen yang tidak berpengalaman dan kekurangan dana dan fasilitas pendukung. Meskipun pemerintah dan pemangku kepentingan telah mengeluarkan peraturan dan dana yang cukup, pelaksanaan di tingkat kelurahan seperti di Pandanwangi belum optimal. Ini adalah *gap* antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, koperasi tidak dapat melakukan peran mereka yang ideal sebagai penggerak perubahan dalam perekonomian masyarakat setempat. Koperasi tidak dapat berkembang menjadi organisasi yang mandiri dan berkelanjutan jika terus bergantung pada dana pemerintah. Dengan adanya koperasi sebagai pelaku ekonomi utama, kebijakan koperasi merah putih memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan potensi, selain itu kehadiran koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah (Ari Aprilis, dkk., 2025: 56).

Ada studi kasus lain yang relevan selain yang dilakukan di Kelurahan Pandanwangi, yang menghadapi masalah sosialisasi kebijakan koperasi yang tidak merata, partisipasi masyarakat yang rendah, manajemen yang tidak memiliki pengalaman, dan kekurangan dana dan fasilitas pendukung. Misalnya, ada lima kelurahan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang: Tlogowaru, Cemorokandang, Wonokoyo, Kota Lama, dan lainnya yang telah membentuk Koperasi Merah Putih. Di tempat ini, pengelolaan koperasi menghadapi

kesulitan dalam menjalankan unit usaha, seperti yang terjadi pada Pandanwangi, karena petunjuk teknis yang tidak jelas dan pengalaman manajemen yang minim (Info Publik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pelaksanaan operasional di lapangan dan kebijakan pemerintah, yang masih perlu diperbaiki melalui pendampingan, pelatihan pengelola, dan penguatan sumber daya manusia untuk membuat koperasi mandiri dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian khusus yang mengkaji proses implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan efektivitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pengelola koperasi agar program ini dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai anggota koperasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari judul "Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang" terdapat pada sumbangannya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah administrasi publik, ekonomi koperasi, serta kebijakan publik. Penelitian ini berpotensi untuk menambah wawasan literatur akademik mengenai cara kebijakan pembentukan koperasi diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi di tingkat lokal.

Lebih dari itu, penelitian ini juga berfungsi dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung serta tantangan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan, sehingga memberikan dasar empiris yang kokoh untuk pengembangan teori dan praktik pembentukan koperasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti,

pelaku kebijakan, dan pengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan koperasi dalam konteks pembangunan ekonomi yang berpihak pada semua kalangan dan berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari judul "Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang" bagi para pelaksana ada pada kemampuannya untuk memberikan arahan yang konkret dalam penerapan kebijakan koperasi di lapangan. Penelitian ini mendukung pengelola koperasi, pemerintah setempat, dan lembaga pendukung dalam memahami langkah-langkah nyata serta taktik yang efisien untuk mendirikan dan memajukan koperasi Merah Putih sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, studi ini berpotensi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksana dalam mengelola koperasi agar lebih efektif, transparan, dan fokus pada pemberdayaan anggotanya.

Di samping itu, hasil studi ini juga bisa digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan bagi pelaksana dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang muncul saat menerapkan kebijakan. Pelaksana koperasi dapat memanfaatkan hasil temuan tersebut untuk mengembangkan inovasi dalam cara pelatihan, pengawasan, dan pengelolaan koperasi sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan ekonomi lokal. Dengan cara ini, pelaksanaan kebijakan pembentukan koperasi Merah Putih

dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta kemajuan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan

